PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SOFIA ADIE KURNIAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **1000178**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.580.000.000

1. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 278 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 71 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 643.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
2. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2024, HADIAH Rp. 50.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

5. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**208.132.064**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**30.000.000**
	Sub Total	**Rp.**	**2.461.132.064**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.461.132.064**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.